

BAB V

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

5.1 Kesimpulan

Kesimpulan yang dipaparkan pada bab ini merujuk pada jawaban atas permasalahan penelitian yang dikaji oleh penulis dalam skripsi yang berjudul *Peran Investasi Asing Terhadap Perekonomian Indonesia Tahun 1967-1998*. Setelah dilakukan pengkajian terhadap permasalahan yang dibahas, maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut.

Kedanaan ekonomi Indonesia pada awal masa pemerintahan Orde Baru sangat tidak stabil dengan inflasi yang tinggi, kekacauan politik serta pembangunan yang belum tuntas. Beban besar tersebut harus segera dituntaskan secara cepat oleh pemerintahan Orde Baru.

Prioritas utama untuk keluar dari zona krisis tersebut ialah memperbaiki perekonomian Indonesia. Beberapa ahli ekonomi dari Universitas Indonesia dan warga negara Indonesia yang sedang belajar diluar negeri ditarik untuk membantu memulihkan ekonomi Indonesia.

Pemerintahan Orde Baru berhasil memulihkan kembali ekonomi Indonesia secara cepat dengan beberapa perubahan kerja dan penerapan teknologi baru dalam berbagai bidang ekonomi. Adanya Undang-Undang Penanaman Modal Asing turut membantu dalam memulihkan perekonomian Indonesia.

Pemerintahan Orde Baru mengambil keputusan perekonomian yang bertolak belakang dengan pemerintahan sebelumnya yaitu dengan menarik modal asing dalam membantu pembangunan ekonomi Indonesia. Keputusan untuk menarik investasi asing dirasa sangat penting oleh pemerintahan Orde Baru untuk meningkatkan perekonomian secara cepat .

Pada awalnya kebijakan mengenai Undang-undang Penanaman Modal Asing ditentang beberapa kelompok yang tidak setuju dengan adanya undang-undang tersebut. Mereka berpendapat bahwa investasi asing merupakan suatu penjajahan modern dalam perekonomian Indonesia

dan akibatnya ekonomi Indonesia akan dikuasai oleh pihak asing dan negara tidak berdaulat lagi secara ekonomi.

Pada kenyataannya memulihkan kembali perekonomian Indonesia tidak bisa hanya dengan mengandalkan modal dan kekuatan modal secara mandiri. Indonesia membutuhkan dukungan dari luar dan salah satunya ialah pengambilan keputusan penanaman modal asing.

Undang-undang mengenai penanaman modal asing dikeluarkan pada tahun 1967. Tujuan diberlakukannya kebijakan penanaman modal asing ialah demi kemajuan ekonomi rakyat banyak. Pelaksanaan penanaman modal asing diatur oleh undang-undang, sedangkan tata caranya diatur oleh pemerintah melalui Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Kemudian MPRS menetapkan bahwa masalah perbaikan ekonomi rakyat harus diberikan prioritas utama diantara soal-soal Nasional.

Indonesia pasti akan menerima keuntungan-keuntungan dengan adanya investasi modal asing antara lain pembentukan-pembentukan sumber devisa yang baru, pembentukan sumber-sumber pajak yang baru, terbentuknya tempat latihan dan pendidikan, terbentuknya lapangan pekerjaan, muncul industri-industri kecil dan lain sebagainya.

Setelah kebijakan tersebut direalisasikan, berikutnya perekonomian Indonesia mulai terlihat berkembang kearah yang lebih baik. Pengerahan modal asing diimplementasikan dalam program pembangunan Indonesia dari Repelita I sampai Repelita VI. Pada Repelita I, pendapatan dari sektor minyak, bantuan asing dan sumber-sumber lain meningkat. Pendapatan Indonesia dari tahun 1966-1974 naik secara pesat. Dengan adanya penanaman modal asing sedikit demi sedikit para investor asing tersebut mulai memainkan perannya dalam pembangunan nasional.

Investor-investor tersebut masuk dalam berbagai bidang perekonomian antara lain, bidang pertanian, kehutanan, minyak, perhubungan, pembangkit listrik, pertambangan dan transportasi. Dari tahun 1969 sampai 1974 dalam bidang ekonomi yang menjadi prioritas hampir semua mengalami kenaikan 100%.

Perkembangan penanaman modal asing berperan penting dalam menciptakan lapangan pekerjaan. Penggunaan tenaga asing dibatasi serta jangka waktu penggunaan tenaga-tenaga asing tersebut tidak boleh lebih dari 3 tahun. Untuk selanjutnya peran tenaga asing tersebut digantikan oleh tenaga-tenaga dari Indonesia.

Dalam Repelita II produksi pertanian lebih tinggi dibandingkan periode sebelumnya. Beberapa faktor yang menghasilkan pertumbuhan ekonomi tinggi pada Repelita II ialah adanya *boom* minyak dan ekspor kayu gelondongan. Tahun 1976 harga minyak dunia mengalami kenaikan tinggi, hal ini menguntungkan bagi Indonesia karena memiliki cadangan minyak yang cukup sehingga dapat mengekspor dengan harga tinggi. Dalam sektor minyak investor-investor asing menyediakan modal dan teknologi sedangkan perusahaan minyak negara menyediakan lahan tambang. Setelah tahun 1974 investasi mulai turun, hal ini berkaitan dengan terjadinya peristiwa Malari pada tanggal 15 Januari 1974 yang pada dasarnya peristiwa tersebut ditujukan terhadap dominasi ekonomi luar negeri terutama investasi yang dilakukan oleh Jepang di Indonesia.

Pada Repelita III peran penanaman modal asing tentunya sudah tidak diragukan lagi, selain memperbaiki perekonomian negara, dengan adanya investasi asing dan proyek-proyek baru tentunya menciptakan lapangan pekerjaan dan menciptakan tenaga-tenaga ahli dari Indonesia.

Selama kurun waktu 1983/1984 sampai dengan 1988/1989 dalam Repelita IV perkembangan penanaman modal asing bervariasi. Proyek-proyek modal asing pada tahun 1984-1986 menurun sementara tahun 1987-1989 mengalami kenaikan kembali.

Sedangkan Repelita V investasi terkonsentrasi di Pulau Jawa, sementara di luar Jawa investasi terbesar terdapat di Provinsi Bali, Riau dan Kalimantan. Investasi asing dalam Repelita V didominasi oleh Jepang, Amerika Serikat dan Korea.

Penanaman modal dalam Repelita VI memberikan peranan penting dalam penciptaan lapangan pekerjaan walaupun penggunaan tenaga kerja asing masih terjadi. Penyerapan tenaga kerja dalam bidang perkebunan,

industri tekstil, makanan dan industri kimia memiliki potensi besar terhadap lapangan pekerjaan.

Indonesia mengalami kemuduran perekonomian kembali pada tahun 1998 setelah terjadi krisis moneter sehingga menyebabkan menurunnya investasi asing terhadap Indonesia bahkan menjadi salah satu negara di ASEAN dengan perekonomian terburuk pada saat krisis moneter. Kepercayaan investor asing untuk menanamkan modalnya kembali di Indonesia dirasa sulit, hal ini berkaitan dengan terjadinya kekacauan politik dan berakhirnya pemerintahan Orde Baru.

5.2 Saran

5.2.1 Untuk Dunia Pendidikan

Sejarah tidak selalu berbicara mengenai peristiwa politik dan perang. Kajian mengenai sejarah perekonomian tidak kalah menarik dan bermanfaat untuk dipelajari. Hal yang menarik mengenai sejarah perekonomian Indonesia pada masa Orde Baru ialah berani melakukan kebijakan bertentangan dengan pemerintahan sebelumnya. Kekayaan sejarah perekonomian Indonesia sangat luas, hal tersebut harus diajarkan dalam pendidikan sekolah sejak dini agar dapat mengetahui peristiwa ekonomi Indonesia yang gemilang dan menanamkan rasa percaya diri dalam bidang perekonomian agar tidak dikuasai oleh kaum selain pribumi.

5.2.2 Untuk Penelitian Selanjutnya

Berdasarkan temuan dalam skripsi yang berjudul *Peran Investasi Asing Terhadap Perekonomian Indonesia Tahun 1967-1998*, penulis memberikan rekomendasi mengenai Peran Penanaman Modal Dalam Negeri Terhadap Perekonomian Indonesia Tahun 1968-1990 untuk dijadikan bahan kajian selanjutnya. Penulis beranggapan bahwa jika hal tersebut diteliti akan menarik sekali dan memberikan pemahaman lebih baik mengenai pembangunan ekonomi Indonesia yang dipengaruhi oleh peran perusahaan swasta dalam negeri. Diberlakukannya PMDN merupakan suatu kebijakan untuk menyaingi peran modal asing yang

masuk ke Indonesia agar perekonomian tidak sepenuhnya dikuasai oleh para penanam modal asing. Pemerintah Orde Baru memberikan kemudahan persyaratan serta fasilitas khusus kepada PMDN untuk merangsang masuknya modal dari dalam negeri untuk pembangunan bangsa. Etnis Cina merupakan penanam modal dalam negeri terbesar pada masa Orde Baru.

Hal yang berkaitan dengan deksripsi diatas mengenai Penanaman Modal Dalam Negeri menurut peneliti sangat penting dan layak untuk dikaji secara mendalam dan komperhensif.